

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Ni Komang Putri Laksmi

NPP. 31.0981

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Keuangan Publik

Email: putrilaksmikomang@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ayu Widowati Johannes, S.STP.,M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Abstract Regional financial performance is an achievement of the results of the work on the objectives or plans of the program of activities of the local government with the absorption of the budget over the period of one budget year. **Purpose:** This study is aimed at analyzing the financial performance of the government of the Ambon Municipality of Maluku Province. **Method:** This research uses the type of descriptive research and qualitative research methods with data collection techniques namely interviews and documentation. This study uses the theory of the analysis of the financial ratio by Mahmud consisting of the ratio of degrees of decentralization, the regional financial independence ratio, the PAD effectiveness ratio and the spending efficiency ratio. **Result:** The results of the study describe an analysis of 14% fiscal decentralisation degree ratio which includes less criteria, 15% analysis of regional financial autonomy ratio with very low financial capacity with an instructive relationship pattern, PAD efficacy ratio analysis of 78% with less effective criterion, 91% analysis of expenditure efficiency ratios with less efficient criteria. **Conclusion:** Based on the results of the analysis of the ratio of financial performance of the government in the City of Ambon categorized as still low and not able to carry out the autonomy of the region with maximum. In order to address such problems, it is possible to intensify and extend local sources of income in accordance with the potential of the region, optimize tax receipt and remuneration, turnover or rotation of staff according to the field and competence of the staff and recruit staff with competence to manage and maximize the use of applications related to financial information systems to help facilitate budget implementation in the City of Ambon as well as local governments can cooperate with financial and academic consultants in order to obtain solutions and perspectives to solve problems in financial performance analysis in Ambon City.

Keywords: Analysis, Financial Performance, Financial Ratio Analysis

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan daerah merupakan suatu pencapaian dari hasil kerja atas target atau rencana program kegiatan pemerintah daerah dengan penyerapan anggaran selama periode satu tahun anggaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon Provinsi Maluku. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terdiri atas rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas PAD dan rasio efisiensi belanja. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menggambarkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 14% yang termasuk kriteria kurang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 15% dengan kemampuan keuangan rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, analisis rasio efektivitas PAD sebesar 78% dengan kriteria kurang efektif, analisis rasio efisiensi belanja sebesar 91% dengan kriteria kurang efisien. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian analisis rasio kinerja keuangan pemerintah di Kota Ambon dikategorikan masih rendah dan belum mampu menjalankan otonomi daerah dengan maksimal. Dilihat pada hasil perhitungan masing-masing indikator kinerja keuangan yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan cara intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan potensi daerah, mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi, perputaran atau rotasi pegawai sesuai bidang dan kompetensi yang dimiliki pegawai dan merekrut pegawai yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan memaksimalkan penggunaan aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan agar membantu untuk mempermudah dalam pelaksanaan anggaran di Kota Ambon serta pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan konsultan keuangan dan akademis agar bisa mendapatkan solusi maupun perspektif mengatasi permasalahan dalam analisis kinerja keuangan di Kota Ambon.

Kata Kunci : Analisis, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi dilihat dari budaya, ekonomi serta dari tata letak geografisnya. Keberagaman berkontribusi pada pembangunan daerah (Made Antara dkk 2018). Hal ini menjadi modal pembangunan nasional melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada. Setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan terhadap potensi sumber daya yang ada di daerah (Afni Nooraini 2018). Hal ini dapat dinilai dari kinerja keuangan daerah yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017 :98) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”. Desentralisasi daerah memberikan kewenangan atau otoritas kepada setiap daerah untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku mencakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan juga pertanggungjawaban (Adissya Mega Christia dkk, 2019). Pemerintah daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam sistem pengelolaan keuangan yang merupakan

sumber utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah (Rahmanurrasjid, Amin 2008). Berdasarkan Ibnu Syamsi (1986: 199) “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna untuk mendukung sistem pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tidak bergantung pada sepenuhnya kepada pemerintah pusat” Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mengetahui apakah APBD sudah dipergunakan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan dipengaruhi oleh APBD. Dana perimbangan merupakan bagian dari APBD berasal dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan untuk memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Salman Alfarisi, 2015).

Tabel 1
Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Ambon
Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kontribusi pendapatan transfer (%)
2019	1.199.821.331.888	985.087.890.725	78
2020	1.146.467.282.588	973.189.179.158	79
2021	1.142.996.021.638	940.614.682.967	75
2022	1.114.446.345.044	917.963.704.149	81
2023	1.204.536.104.742	930.454.712.510	77
Rata-rata			78

Sumber : <https://ambon.go.id/apbd>

Berdasarkan data di atas adanya perubahan dana perimbangan pada tahun 2019–2023. Dana perimbangan mengalami penurunan secara berkala pada tahun 2019-2022 dan naik pada tahun 2023. Pada tahun 2019 dana perimbangan mencapai Rp985.087.890.725, pada tahun 2022 dana perimbangan turun menjadi Rp917.963.704.149 sehingga pada tahun 2023 naik menjadi Rp930.454.712.510. Rata-rata kontribusi dana perimbangan mencapai nilai 78% yang artinya dana perimbangan memiliki peran yang besar dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Ambon.

Tabel 2
Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi pendapatan Asli Daerah (%)
2019	1.199.821.331.888	162.761.891.568	13
2020	1.146.467.282.588	131.753.646.248	11
2021	1.142.996.021.638	153.520.817.934	13
2022	1.114.446.345.044	177.889.732.162	10
2023	1.204.536.104.742	274.081.392.232	22
Rata – rata			14

Sumber : <https://ambon.go.id/apbd>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Kontribusi pendapatan asli daerah rata-rata sebesar 14%. Pendapatan transfer atau dana perimbangan lebih berkontribusi daripada pendapatan asli daerah sendiri. Perbandingan nilai pendapatan transfer dan PAD yaitu kontribusi pendapatan transfer 78% dan kontribusi pendapatan asli daerah 14%. Berdasarkan hasil perbandingan dapat dilihat pendapatan transfer sangat berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Ambon.

Potensi di Kota Ambon perlu dikelola secara optimal agar sumber pendapatan asli daerah dapat menjadi penopang dalam menjalankan otonomi daerah. Pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan sumber penerimaan PAD yang dikelola pemerintah daerah yang harus digali, diperluas dan ditingkatkan lagi agar dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan daerah dan terciptanya kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja fiskal pemerintah daerah pada dasarnya memiliki tujuan yaitu untuk mengukur serta mengevaluasi kinerja pemerintah dan mengukur potensi pendapatan daerah, menganalisis kebijakan yang telah dijalankan selama periode satu tahun anggaran, dan membuat strategi perbaikan serta menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya serta memastikan pemerintah melaksanakan peraturan anggaran sesuai undang-undang (Shania Nur dan Jihad Panjawa, 2020). Alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah Rasio Kinerja Keuangan Daerah.

Berdasarkan temuan pada penelitian di BPKAD Kota Ambon peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan anggaran yang tidak terealisasi dengan maksimal yang berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hal ini yaitu pada pendapatan asli daerah yang dinilai bahwa PAD sangat berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Maka dari itu perlunya dilakukan proses Analisis Kinerja Keuangan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kota Ambon dalam menjalankan otonomi daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku dimana pada tahun 2019-2023 banyaknya anggaran yang tidak terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya baik pendapatan daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dimana ke tiga hal tersebut merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh di dalam menjalankan otonomi daerah. Di Kota Ambon pada baik pendapatan daerah maupun pendapatan transfer dari tahun 2019-2023 terus mengalami fluktuasi yang menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi daerah di Kota Ambon dimana yang seharusnya setiap tahun pendapatan daerah dan pendapatan transfer harus mengalami peningkatan yang konsisten. Tingginya angka tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon. Pada tahun 2023 pendapatan transfer di Kota Ambon mencapai Rp930.454.712.510(LRA 2023), Kontribusi pendapatan transfer di Kota Ambon mencapai nilai 78% yang artinya bahwa pendapatan transfer sangat berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon. Tingginya tingkat ketergantungan dipengaruhi oleh rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hanya 14%. Perolehan PAD tahun 2023 hanya mencapai nilai Rp274.081.392.232 di mana nilai ini tidak berpengaruh besar di dalam membantu penyelenggaraan otonomi daerah.

Kontribusi PAD yang rendah dipengaruhi oleh kinerja pemerintah di dalam mengelola potensi daerah yang ada di Kota Ambon. Pemerintah daerah belum mampu secara maksimal di dalam mengelola

potensi daerah yang ada terutama pada pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan yang utama dan bernilai besar dalam menunjang pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Semakin rendahnya kualitas pelayanan publik maka akan semakin rendah juga kesadaran masyarakat. Banyak sekali potensi sumber daya yang ada di Kota Ambon yang di nilai dapat menambah nilai PAD dan banyak juga potensi yang belum di gali dan dikelola dengan maksimal, seperti sumber daya alam laut dan tempat wisata yang dapat dieksplor dan dimanfaatkan. Hal ini di pengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia (SDM) di dalam mengelola keuangan daerah dan potensi daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik dalam kinerja keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan PADnya. Penelitian Paramitha Sandy Mokodompit dkk, berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Paramitha Sandy Mokodompit dkk ,2014), menemukan bahwa kemampuan desentralisasi dan tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Kotamobagu masih sangat rendah yang di pengaruhi oleh kurangnya pengelolaan PAD terutama pada penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah. Penelitian Mega Oktavia Ropa menemukan bahwa rasio efektivitas dan rasio efisiensi dikategorikan efektif dan kurang efisien namun rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan masih rendah. perlunya peningkatan PAD walaupun pada dasarnya dana dari pemerintah pusat maupun provinsi cukup besar untuk membantu pelaksanaan otonomi daerah namun perlunya kemandirian keuangan daerah agar Kabupaten Minahasa tidak bergantung pada dana transfer (Mega Oktavia Ropa, 2016). Penelitian Heri Faisal Harahap menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik namun jika di hitung menggunakan rasio kinerja keuangan menghasilkan nilai yang rendah. Melakukan update data pengusaha wajib pajak melalui Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan sebagainya perlu di lakukan untuk memaksimalkan penerimaan PAD, menggali potensi PAD dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Tapanuli Tengah (Heri Faisal Harahap,2020). Penelitian Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar menemukan bahwa realisasi penerimaan PAD di Kota Malang memiliki kategori sangat efektif yang artinya Pemerintah Kota Malang cukup maksimal di dalam menggali potensi PAD yang ada, namun ketergantungan terhadap dana dari pusat cukup tinggi masalah ini dapat di atasi dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, perbaikan fasilitas pelayanan sangat perlu dilakukan untuk mempermudah perizinan bagi investor untuk peningkatan PAD dan memprioritaskan anggaran untuk mendanai kegiatan yang dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Malang (Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Kamilaus Konstase Oki dkk tentang analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belu bahwa masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membantu penyelenggaraan otonomi daerah, di Kabupaten Belu memiliki nilai strategis baik dan sumber daya alam dengan potensi yang sangat baik, diperlukan perhatian khusus dalam memanfaatkan sumber pendapatan tersebut untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Kamilaus Konstase Oki dkk,2020). Temuan pada penelitian Imelda Sari dkk mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Tangerang Selatan tahun 2010-2019 yaitu rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan yang fluktuatif, rasio derajat desentralisasi memiliki nilai yang stabil namun rasio ketergantungannya tergolong tinggi hingga sangat tinggi (Imelda Sari, dkk 2021). Pada hasil penelitian Nisfi Nova Karina dan Puji Wibowo ditemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sudah cukup baik, jika di lakukan perbandingan sebelum dan sesudah pandemi covid-19 mana kinerja keuangannya cenderung menurun yang dipengaruhi oleh penurunan PAD (Nisfi Nova Karina dan Puji Wibowo 2022). Temuan pada penelitian Agung Danang

Rahardi dan Kumba Digwiseiso bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2018-2022 belum berjalan dengan optimal dan terus mengalami perbaikan, tahun 2022 merupakan kinerja terbaik yang diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (Agung Danang Rahardi dan Kumba Digwiseiso 2023). Penelitian Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup baik, namun diperlukan peningkatan terhadap kemandirian dan efektivitas dan optimalisasi terhadap efisiensi serta penggalan sumber-sumber baru yang dinilai sebagai sumber penerimaan lainnya (Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo, 2022). Penelitian Kumba Digdowiseiso dan Muh Alfian menemukanya bahwa dari tahun 2017-2021 dalam rasio efektivitas yang memenuhi kriteria efektif hanya tahun 2017, rasio kemandirian dari tahun 2017-2021 menunjukkan pola hubungan instruktif, rasio kemandirian yang rendah sekali dan rasio derajat desentralisasi yang kurang atau tidak baik. Hal ini menggambarkan rasio kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bima dari tahun 2017-2021 belum berjalan optimal (Kumba Digdowiseiso dan Muh Alfian, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan yaitu analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data menurut (Hartati, 2019) menggunakan tambahan triangulasi data yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data yang di kutip pada jurnal (Mudija Raharjo, 2012) berbeda dengan penelitian Paramitha Sandi Mokodompik, Heri Faisal Harahap, Agus Munandar yang menggunakan metode kuantitatif Selain itu indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan teori dari Mahmudi (2016) analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan empat sub dimensi yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja.

1.5. Tujuan.

Adapun tujuan penelitian yang didasari atas rumusan masalah antara lain yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif metode kualitatif menurut Creswell (2016: 4) merupakan “Suatu metode untuk mengeksplorasi serta memahami makna sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari berbagai masalah atau peristiwa kemanusiaan”. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Hartati (2019) yaitu observasi wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori Mahmudi (2016) terkait analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan empat rasio yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan serta mengacu pada analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerah Kota Ambon yang berdasar pada rasio kinerja keuangan daerah teori yang telah dijelaskan oleh Mahmudi (2016) antara lain:

A. Rasio Derajat Desentralisasi

Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk mendorong kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat ditentukan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi. Metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan besaran kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah untuk mendukung otonomi daerah.

Berikut merupakan rumus Rasio Derajat Desentralisasi :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas derajat desentralisasi menunjukkan perbandingan antara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut perhitungan rasio derajat desentralisasi Kota Ambon:

2019 =	$\frac{162.761.891.568}{1.199.821.331.888}$	x100%= 13%
2020 =	$\frac{131.753.646.248}{1.146.467.282.588}$	x100%= 11%
2021 =	$\frac{153.520.817.934}{1.142.996.021.638}$	x100%= 13%
2022 =	$\frac{177.889.732.162}{1.114.446.345.044}$	x100%= 10%
2023 =	$\frac{274.081.392.232}{1.204.536.104.742}$	x100%= 22%

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rasio derajat desentralisasi sebesar 13%, pada tahun 2020 turun menjadi 11%, kemudian naik lagi menjadi 13% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 rasio derajat desentralisasi turun menjadi 10% sehingga pada tahun 2023 rasio derajat desentralisasi meningkat menjadi 22% dengan kategori cukup.

Tabel 3

Rasio Derajat Desentralisasi Kota Ambon Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
2019	162.761.891.568	1.199.821.331.888	13 (Kurang)
2020	131.753.646.248	1.146.467.282.588	11 (Kurang)
2021	153.520.817.934	1.142.996.021.638	13 (Kurang)
2022	177.889.732.162	1.114.446.345.044	10 (Sangat Kurang)
2023	274.081.392.232	1.204.536.104.742	22 (Cukup)

Rata-rata	180.001.496.028	1.161.653.417.180	14 (Kurang)
------------------	-----------------	-------------------	-------------

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas melalui perhitungan rasio derajat desentralisasi pada tahun 2019-2023. Pada tahun 2019-2021 jika diukur dengan menggunakan presentase kriteria derajat desentralisasi Kota Ambon berada pada skala presentase 10,01%-20,00% yang artinya Kurang, hingga tahun 2022 angka rasio derajat desentralisasi menurun hingga 10% dengan kriteria sangat kurang. Namun pada tahun 2023 rasio derajat desentralisasi meningkat memasuki skala presentase 20,02%–30,00% dengan kriteria cukup. Namun, jika dirata-ratakan presentase kriteria derajat desentralisasi Kota Ambon hanya mencapai presentase 14% yang artinya kriteria derajat desentralisasi Kota Ambon kurang. Peristiwa ini disebabkan karena masih kurangnya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon sehingga menyebabkan kecilnya pengaruh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia yang belum mampu menggali dan mengelola potensi sumber PAD maupun sumber PAD yang sudah ada.

B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kota Ambon dapat ditentukan dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Cara atau metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah serta segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut merupakan rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumusan di atas menunjukkan perbandingan antara kontribusi pendapatan asli daerah dengan penerimaan atau pendapatan sumber lain baik dari pihak internal maupun eksternal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon:

2019 =	$\frac{162.761.891.568}{985.087.890.725}$	x100%= 17% (rendah sekali)
2020 =	$\frac{131.753.646.248}{973.189.179.158}$	x100%= 14% (rendah sekali)
2021 =	$\frac{153.520.817.934}{940.614.682.967}$	x100%= 16% (rendah sekali)
2022 =	$\frac{177.889.732.162}{917.963.704.149}$	x100%= 19% (rendah sekali)

$$2023 = \frac{274.081.392.232}{930.454.712.510} \times 100\% = 29\% \text{ (rendah)}$$

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019-2022 rasio kemandirian keuangan daerah berada pada angka kemandirian 0%-25% dengan kemampuan keuangan rendah sekali, namun pada tahun 2023 rasio kemandirian keuangan daerah meningkat menjadi 29% dengan tingkat kemampuan keuangan rendah.

Tabel 4

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Ambon Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Rasio Kemandirisan Keuangan Daerah
2019	162.761.891.568	985.087.890.725	17% (Instruktif)
2020	131.753.646.248	973.189.179.158	14% (Instruktif)
2021	153.520.817.934	940.614.682.967	16% (Instruktif)
2022	177.889.732.162	917.963.704.149	19% (Instruktif)
2023	274.081.392.232	930.454.712.510	29% (Konsultatif)
Rata-rata	180.001.496.028	949.462.033.901	19% (Instruktif)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan pada tabel 4.2 di atas pada tahun 2019-2022 jika diukur dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian pada rasio kemandirian keuangan daerah, Kota Ambon berada pada skala presentase 0%-25% dengan pola hubungan instruktif artinya bahwa pada Kota Ambon kontribusi pemerintah pusat lebih besar dari pada pemerintah daerah sendiri terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah. Pada tahun 2019 rasio kemandirian keuangan daerah kota ambon sebesar 17%, pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon sebesar 14%, tahun 2021 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon sebesar 16% dan tahun 2022 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon mencapai nilai 19%. Setelah pandemi Covid 19 rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon perlahan meningkat dan membaik. Sehingga pada tahun 2023 berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon sebesar 29% berada pada skala presentase 25%-50% dengan pola hubungan konsultatif yang memiliki arti bahwa peran pemerintah pusat pada tahun 2023 mulai berkurang dikarenakan pemerintah daerah Kota Ambon dinilai sudah mulai sedikit mampu dalam menjalankan otonomi daerahnya. Namun jika dirata-ratakan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon hanya mencapai nilai 19% dengan pola hubungan instruktif yang artinya bahwa masih tingginya ketergantungan dan pengaruh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kota Ambon di dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kontribusi PAD sehingga menyebabkan kemampuan pemerintah daerah rendah dalam membiayai kebutuhan daerahnya

C. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur kemampuan atau potensi pemerintah daerah Kota Ambon dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target PAD yang telah ditetapkan dapat diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Metode ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi yang diperoleh terhadap target yang ditetapkan serta sejauh mana

kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Berikut rumus Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas rasio efektivitas PAD diperoleh melalui perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah diperoleh hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon.

2019 =	$\frac{162.761.891.568}{184.452.217.679}$	x100%= 88%
2020 =	$\frac{131.753.646.248}{194.842.563.427}$	x100%= 68%
2021 =	$\frac{153.520.817.934}{234.429.747.272}$	x100%= 65%
2022 =	$\frac{177.889.732.162}{206.866.883.287}$	x100%= 86%
2023 =	$\frac{274.081.392.232}{302.368.579.761}$	x100%= 91%

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada rasio efektivitas pendapatan asli daerah pada tabel di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2019 rasio efektivitas PAD berada pada nilai 88%. Pada tahun 2020 rasio efektivitas PAD sebesar 68% dan tahun 2021 turun menjadi 65%. Hal ini dipengaruhi oleh bencana pandemi Covid 19, kemudian pada tahun 2022 rasio efektivitas PAD naik menjadi 86% dan tahun 2023 sebesar 91%.

Tabel 5

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon Tahun 2019-2023

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas PAD
2019	184.452.217.679	162.761.891.568	88% (Cukup efektif)
2020	194.842.563.427	131.753.646.248	68% (Kurang efektif)
2021	234.429.747.272	153.520.817.934	65% (Kurang efektif)
2022	206.866.883.287	177.889.732.162	86% (Cukup efektif)
2023	302.368.579.761	274.081.392.232	91% (Efektif)

Rata-rata	224.591.998.285	180.001.496.028	78% (Kurang efektif)
------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan pada tabel di atas melalui perhitungan rasio efektifitas PAD pada tahun 2019 rasio efektifitas PAD berada pada skala presentase 80%-90% dengan kriteria cukup efektif, kemudian pada tahun 2020-2021 rasio efektifitas PAD berada pada skala presentase 60%-80% dengan kriteria kurang efektif. Namun tahun 2022 rasio efektifitas PAD mengalami peningkatan yaitu pada skala presentase 80%-90% dengan kriteria cukup efektif. Tahun 2023 presentase rasio efektifitas PAD meningkat dengan skala presentase mencapai 90%-100% dengan kriteria efektif. Tidak hanya tanggung jawab BPKAD Kota Ambon untuk meningkatkan kinerja keuangan, namun hal ini juga merupakan tanggung jawab bagi pemerintah daerah Kota Ambon. Peningkatan yang terjadi tahun 2022 hingga 2023 merupakan hasil dari reformasi kebijakan, peningkatan kapasitas administrasi, atau upaya lebih besar dalam menggali dan mengelola potensi daerah secara lebih baik. Berdasarkan Halim 2004 rasio efektifitas PAD Kota Ambon berada pada skala presentase 60%-80% yaitu 78% dengan kategori kurang efektif.

D. Rasio Efisiensi Belanja

Untuk mengukur seberapa besar efisiensi belanja dalam kinerja pemerintah daerah guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja.

Berikut merupakan rumus Rasio Efisiensi Belanja :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Belanja digunakan sebagai tolak ukur seberapa efisien pendapatan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah secara menyeluruh, jika semakin kecil anggaran yang dikeluarkan dalam belanja daerah namun hasil atau progres penyelenggaraan pemerintah daerah atau kinerjanya baik maka akan semakin efisien begitu juga sebaliknya

2019 =	$\frac{1.131.350.277.738}{1.204.791.689.699} \times 100\% = 94\%$
2020 =	$\frac{1.176.341.175.499}{1.061.974.497.282} \times 100\% = 90\%$
2021 =	$\frac{1.292.051.453.511}{1.139.622.245.666} \times 100\% = 88\%$

2022 = $\frac{1.110.263.638.646}{1.198.549.548.597} \times 100\% = 93\%$
2023 = $\frac{1.099.704.149.358}{1.184.795.991.519} \times 100\% = 93\%$

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi belanja pada tabel diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2019-2021 rasio efisiensi belanja mengalami penurunan yang konsisten. Tahun 2019 rasio efisiensi belanja sebesar 94%, pada tahun 2020 sebesar 90% dan pada tahun 2021 sebesar 88%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022-2023 sebesar 93%.

Tabel 6
Rasio Efisiensi Belanja Kota Ambon Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja
2019	1.131.350.277.738	1.204.791.689.699	94% (Kurang efisien)
2020	1.176.341.175.499	1.061.974.497.282	90% (Kurang efisien)
2021	1.292.051.453.511	1.139.622.245.666	88% (Cukup efisien)
2022	1.110.263.638.646	1.198.549.548.597	93% (Kurang efisien)
2023	1.099.704.149.358	1.184.795.991.519	93% (Kurang efisien)
Rata-rata	1.161.942.138.950	1.157.946.794.552	91% (Kurang efisien)

Sumber : Data diolah Penulis melalui LRA Kota Ambon tahun 2019-2023

Berdasarkan pada tabel di atas pada tahun 2019-2020 rasio efisiensi belanja berada pada skala presentase 90%-100% pada tahun 2019 rasio efisiensi belanja sebesar 94% dan tahun 2020 sebesar 90% dengan kriteria kurang efisien, kemudian pada tahun 2021 rasio efisiensi belanja menurun pada skala presentase 80%-90% sebesar 88% dengan kriteria cukup efisien. Pada tahun 2022-2023 rasio efisiensi belanja konsisten tetap pada skala presentase 90%-100% sebesar 93% dengan kriteria kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belanja di Kota Ambon tidak efisien. Jika dirata-ratakan maka rasio efisiensi belanja Kota Ambon berada pada angka 91% dengan kriteria kurang efisien. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggunakan anggaran dengan bijak dan efisien, hemat dan tepat sasaran. Dikatakan hemat apabila pemerintah mampu menggunakan anggaran dengan sedikit tetapi sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tingginya presentase rasio efisiensi belanja dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia sendiri, sama halnya dengan rasio derajat desentralisasi karena di Kota Ambon sendiri masih terdapat beberapa pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga menyebabkan realisasi belanja tidak mencapai nilai yang maksimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Ambon dalam merealisasikan dan menggunakan anggaran untuk pelaksanaan otonomi daerah. Peneliti menemukan temuan dimana setiap perhitungan rasio kinerja keuangan pada Kota Ambon memberikan hasil yang tidak maksimal sama halnya dengan temuan pada penelitian

Paramitha Sandy Mokodompit dkk bahwa rasio derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yang di pengaruhi oleh tidak maksimalnya sumber penerimaan PAD (Paramitha Sandy Mokodompit dkk ,2014) sama halnya dengan peneletian sebelumnya yang lainnya bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah rata-rata masih rendah dan belum maksimal. Namun berbeda dengan penelitian Mega Oktavia Ropa karena berdasarkan hasil pengukuran rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian keuangan daerah bahwa Kabupaten Minahasa Selatan cukup efektif dalam merealisasikan PAD namun tidak efisien dalam menggunakan anggaran dan namun kemandirian keuangan daerahnya rendah (Mega Oktavia Ropa, 2016), hal ini membuktikan bahwa tidak semua daerah memiliki rasio kinerja keuangan yang rendah tergantung pada SDM yang mengelola anggaran dan potensi yang ada pada setiap daerah.. Hasil temuan pada penelitian bahwa Pemerintah daerah Kota Ambon masih sangat bergantung pada dana transfer yang di buktikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Ambon yang masih rendah. Temuan ini memperkuat temuan pada penelitian sebelumnya dimana semua daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat maupun provinsi di buktikan dengan hasil setiap perhitungan rasio kinerja keuangan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan setiap daerah terhadap dana transfer.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat dalam analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon Provinsi Maluku yaitu masih rendahnya kualitas SDM dilihat dari masih banyaknya pegawai bekerja tidak sesuai skill dan potensinya, terdapat beberapa pegawai yang berumur ≥ 45 keatas yang dinilai bahwa usia ≥ 45 kurang mampu dalam mengikuti perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih yang semuanya serba digital. Kurangnya optimalisasi PAD, rendahnya kualitas pelayanan publik yang menyebabkan mudarnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk membayar pajak maupun retribusi sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan PAD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan Kota Ambon dikategorikan masih rendah dalam membantu pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dilihat dari hasil rasio pada masing-masing indikator kinerja keuangan. Hasil dari analisis Rasio Derajat Desentralisasi Kota Ambon berada pada angka rata-rata 14%, dengan kriteria masih kurang. Hasil dari pada analisis Rasio Kemandirian Keuangan daerah Kota Ambon berada pada angka presentase rata-rata 19%, dengan pola hubungan instruktif. Hasil dari analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon berada pada angka presentase rata-rata 78% dengan kategori kurang efektif dalam mengelola PAD. Hasil dari analisis Rasio Efisiensi Belanja Kota Ambon berada pada angka rata-rata 91% dengan kriteria kurang efisien. Dengan beberapa faktor penghambat yang di nilai mempengaruhi analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon provinsi Maluku yaitu Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang bekerja tidak sesuai kompetensinya, belum optimalnya pengelolaan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah, rendahnya Kualitas Pelayanan publik yang mengakibatkan menurunnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta perubahan kebijakan dan prioritas atau kebutuhan yang dapat berubah kapan saja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni pada waktu penelitian yang hanya 10 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa

berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Ambon provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian, serta terimakasih juga kepada seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afni Nooraini. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Adissya Mega Christia dkk. (2019). Desentralisasi Fiskal dan otonomi Daerah Indonesia.

Rahmanurrajjid, Amin. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah. Tesis Tidak Dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum-Universitas Diponegoro.

Salman Alfarisi. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Shania Nur dan Jihad Panjawa. (2020). Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan daerah Kota Magelang.

Heri Faisal Harahap. (2020). *Journal of Economics and Business*. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/viewFile/87/91>

Kamilaus Oki dkk.(2020). Jurnal Ekonomi Pembangunan. Analisa Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. <http://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JEP/article/view/584/328>

Mega Oktavia Ropa. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13153>

Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar. (2021). Jurnal Ilmiah MEA. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. https://digilib.Esaunggll.acid/public/UEU-Journal-23707-11_2402.pdf

Made Antara dkk. (2018). Keberagaman Budaya Indonesia Inspirasi Industri. Universitas Udayana.

Mudjia Rahardjo. (2012). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. <http://mudjiaarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>

Paramita Sandy Mokodompit dkk. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. [file:///C:/Users/HP/Downloads/iogi2018,+6+Paramitha+S+Mokodompit_AkRs%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/iogi2018,+6+Paramitha+S+Mokodompit_AkRs%20(1).pdf)

Imelda Sari, dkk. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/134>

Nisfi Nova Karina dan Puji Wibowo. (2022). Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum dan Sesaat Pandemi Covid-19. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/akuntansi/article/view/4512>

Kumba Digidowiseiso dan Muh Alfian. (2023). Jurnal Ilmiah Global Education). Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/576>

- Creswell, J.W, (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendika.
- Rudi Badrudin. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ibnu Syahmi. (1986). *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Tingkat Nasional*. Jakarta: CV Rajawali
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.

